

ANALISIS INDEKS PENERAPAN ANTI-KORUPSI DAN BUDAYA ETIKA DI INDUSTRI INDONESIA

Rinduan Siagian¹, Parlaban Karo-Karo², Nur Maliana Harum HRP³
Universitas Efarina, Indonesia^{1,2,3}
Email: riduansiagian.ipwija@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis indeks penerapan kebijakan anti-korupsi dan budaya etika pada sektor industri di Indonesia. Isu korupsi masih menjadi persoalan serius dan berdampak negatif tidak hanya pada kinerja ekonomi nasional, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan swasta. Sejak reformasi pasca-1998, upaya pemberantasan korupsi mengalami pergeseran dari pendekatan yang bertumpu pada penegakan hukum menuju pembangunan integritas melalui reformasi institusional dan penguatan budaya organisasi. Penelitian menggunakan studi literatur dan kajian kualitatif dengan analisis dokumen, dengan memadukan teori kelembagaan dan teori budaya organisasi (Schein) untuk mengorganisasikan temuan terkait regulasi, nilai organisasi, dan perubahan perilaku internal. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan anti-korupsi sangat dipengaruhi oleh reformasi kelembagaan, kepemimpinan etis, efektivitas program integritas (misalnya Integrity Zone), serta keberlanjutan transformasi budaya. Evaluasi melalui indikator seperti SPI, IPAK, dan IPK mengindikasikan adanya perbaikan di beberapa area, namun masih terdapat celah yang perlu diperkuat. Rekomendasi strategis meliputi adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi pelaporan, peningkatan pelatihan anti-korupsi dan pendidikan etika secara berkala, serta kolaborasi lintas lembaga dan stakeholder untuk mengatasi hambatan struktural maupun budaya dalam industri.

Kata kunci: *Anti-Korupsi, Budaya Etika, Kepemimpinan Etis, Indeks Pengukuran*

Abstract

This study analyzes the index of anti-corruption policy implementation and ethical culture in Indonesia's industrial sector. Corruption remains a serious problem that negatively affects not only national economic performance, but also public trust in both governmental and private institutions. Since the post-1998 reform era, anti-corruption efforts have shifted from law enforcement-centered approaches toward building integrity through institutional reform and strengthening organizational culture. Using a literature review approach with qualitative document analysis, the research integrates institutional theory and organizational culture theory (Schein) to organize findings related to regulations, organizational values, and changes in internal behavior. The study finds that the effectiveness of anti-corruption policies is strongly shaped by institutional reform, ethical leadership, the implementation of integrity programs (e.g., Integrity Zone), and the sustainability of cultural transformation. Evaluation through indicators such as SPI, IPAK, and IPK suggests improvements in some areas, yet significant gaps still remain. Strategic recommendations include adopting information technology to enhance monitoring and reporting transparency, conducting continuous anti-corruption training and ethics education, and strengthening cross-institution and stakeholder collaboration to address both structural and cultural barriers in the industry.

Keywords: *Anti-corruption, Ethical culture, Ethical leadership, Measurement index*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan kebijakan anti-korupsi dan pembangunan budaya etika di perusahaan industri di Indonesia telah menjadi isu strategis yang mendesak. Korupsi yang masih merajalela tidak hanya berdampak negatif pada kinerja ekonomi nasional tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan swasta. Korupsi merupakan aspek dari tingkah laku sosial dalam suatu komunitas yang diakui dan dipahami sebagai tindakan-tindakan aneh, cenderung merugikan, dan bersifat negatif. Masyarakat memiliki beragam perspektif mengenai tindakan

korupsi, meskipun terkadang ada pendapat yang kurang jelas, terutama jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok dalam komunitas dengan status sosial tertentu Kristen & Wacana, (2024).

Sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Nahariah, (2024). Korupsi merupakan aspek dari tingkah laku sosial dalam suatu komunitas yang diakui dan dipahami sebagai tindakan-tindakan aneh, cenderung merugikan, dan bersifat negatif. Masyarakat memiliki beragam perspektif mengenai tindakan korupsi, meskipun terkadang ada pendapat yang kurang jelas, terutama jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok dalam komunitas dengan status sosial tertentu Kristen & Wacana, (2024). Berbagai program telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk pendekatan sistematis melalui literatur review serta penerapan program integritas dan etika seperti Integrity Zone dan Program Etika Perusahaan.

Penelitian ini mengkaji indeks penerapan kebijakan anti-korupsi dan budaya etika di sektor industri Indonesia dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini disusun layaknya skripsi/tesis dengan membahas aspek konseptual, metodologis, hingga analisis hasil, guna memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan untuk memperkuat budaya etika sekaligus menekan tingkat korupsi.

Korupsi telah menjadi masalah kronis di Indonesia, terutama di tingkat perusahaan dan lembaga publik. Dalam dekade terakhir, upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai kebijakan dan reformasi institusi telah dilakukan. Namun, masih terdapat kekurangan terutama di sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Sejak era reformasi pasca-1998, perkembangan kebijakan anti-korupsi menunjukkan pergeseran paradigma dari hanya mengandalkan penegakan hukum ke upaya membangun budaya organisasi yang bersih dan transparan. Berbagai inisiatif seperti pembentukan Badan Anti Korupsi, program integritas, dan evaluasi melalui pengindeksan seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Perilaku Anti-korupsi (IPAK) telah diperkenalkan. Program seperti Integrity Zone di lingkungan lembaga pemerintah dan penerapan Program Etika Perusahaan di sektor swasta menjadi contoh konkret untuk menumbuhkan lingkungan usaha yang bebas dari korupsi.

Pada sektor industri, tantangan penerapan budaya etika semakin kompleks karena melibatkan berbagai level manajemen, budaya organisasi yang sudah mapan, dan tekanan kompetitif di pasar global. Studi terkini menunjukkan bahwa efektivitas program anti-korupsi tidak hanya tergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap proses bisnis. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap indeks penerapan kebijakan anti-korupsi dan budaya etika merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi hambatan dan potensi inovasi di industri Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan kebijakan dan implementasi anti-korupsi di perusahaan industri Indonesia.

Dengan melihat berbagai literatur dan studi kasus seperti Integrity Zone dan program-program etika di sektor swasta, penelitian ini akan menetapkan seberapa efektif kebijakan tersebut dijalankan.

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi budaya etika yang tumbuh dalam lingkungan perusahaan industri.

Penelitian ini mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti kepemimpinan etis, manajemen risiko, dan sistem pelaporan sebagai indikator penting dalam membangun budaya yang bersih.

3. Menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan indeks penerapan anti-korupsi dan budaya etika secara keseluruhan.

Dengan menghubungkan teori kelembagaan dan praktik organisasi, penelitian ini berusaha memberikan panduan yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan di industri.

LANDASAN TEORI

...
Kajian pustaka merupakan bagian fundamental dalam menyusun kerangka teoretis. Beberapa konsep dan teori utama yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Definisi Anti Korupsi dan Budaya Etika

Anti-korupsi berkaitan dengan upaya sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindak pidana korupsi melalui penerapan regulasi, pengawasan internal, dan penegakan hukum. Membangun karakter yang kuat pada generasi muda adalah usaha penting untuk melawan korupsi. Generasi muda berperan penting dalam mewujudkan perubahan signifikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan berintegritas. Pendidikan mengenai anti korupsi muncul sebagai alat yang sangat penting untuk memberikan kepada generasi muda pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai integritas serta akibat buruk dari korupsi Riza & Barrulwalidin, (2024). Sedangkan budaya etika merujuk pada nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mendasari pengambilan keputusan dan interaksi antar pribadi di dalam organisasi. Etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain (Keraf,1998). Pada era moderen saat ini, isu mengenai etika dan perilaku etis mendapatkan perhatian yang lebih besar. Minat tersebut sebagian disebabkan karena kasus-kasus yang bersifat meragukan atau perilaku tidak etis yang potensial dan berhubungan dengan biaya (Kreitner dan Kinicki, 2010).

2. Kerangka Teoritis

2.1. Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan menjelaskan bagaimana norma, regulasi, dan praktik yang diterima secara sosial membentuk struktur dan perilaku organisasi. Penerapan anti-korupsi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk isomorfisme normatif dan mimetik, di mana perusahaan meniru praktik terbaik untuk mendapatkan legitimasi.

2.2. Teori Budaya Organisasi Schein

Menurut Schein, budaya organisasi terdiri dari tiga lapisan yaitu artefak, nilai-nilai yang dianut, dan asumsi dasar. Penerapan kebijakan anti-korupsi yang efektif memerlukan perubahan pada ketiga lapisan tersebut agar integritas dapat terinternalisasi secara menyeluruh

2.3 Studi Terkait

Beberapa studi telah mengkaji penerapan kebijakan anti-korupsi dalam konteks nasional, seperti studi literatur sistematis mengenai dinamika kebijakan anti-korupsi di level lokal di Indonesia dan analisis program etika perusahaan yang dimulai sejak era 1980-an di Amerika Serikat dengan penerapan di Indonesia. Selain itu, penerapan program Integrity Zone di lembaga pemerintah menunjukkan bahwa pencapaian indikator seperti WBK dan WBBM masih perlu diimbangi dengan perubahan budaya internal untuk memastikan keberlanjutan.

2.4 Indeks Pengukuran Anti Korupsi

Indeks pengukuran anti-korupsi di Indonesia dinilai melalui tiga indikator utama: SPI, IPAK, dan IPK. Tabel berikut menunjukkan perbandingan ketiganya:

Tabel 1. Indikator Pemberantas Korupsi

Indikator	Skala Pengukuran	Keterangan
Survei Penilaian Integritas (SPI)	1 – 100	Mengukur integritas lembaga pemerintah, nilai lebih tinggi = lebih baik >
Indeks Perilaku Anti-korupsi (IPAK)	1 – 5	Mengukur sikap masyarakat terhadap korupsi, nilai tinggi menunjukkan sikap antikorupsi yang kuat >
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	1 – 100	Mengukur persepsi global terhadap korupsi di suatu negara, dengan peringkat dari 180 negara >

Penjelasan Tabel: Tabel di atas memberikan gambaran mengenai tiga indikator utama yang digunakan dalam mengukur keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. SPI menilai integritas institusi, IPAK melibatkan persepsi masyarakat, dan IPK memberikan peringkat global yang mencerminkan tingkat kebersihan suatu negara dari korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan kajian kualitatif dengan analisis dokumen sebagai metodologi utama. Metode penelitian dilaksanakan melalui langkah- langkah berikut:

1. Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan, seperti artikel ilmiah, laporan kebijakan, dokumen evaluasi, dan berita terkait program anti-korupsi di Indonesia Data sekunder diambil dari hasil survei seperti SPI, IPAK, dan IPK yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dan kualitatif dengan mengidentifikasi aspek- aspek utama penerapan kebijakan anti-korupsi dan budaya etika. Penerapan teori kelembagaan dan teori budaya organisasi Schein digunakan untuk mengorganisasikan temuan sehingga mencerminkan hubungan antara regulasi, nilai-nilai organisasi, dan perubahan perilaku internal.

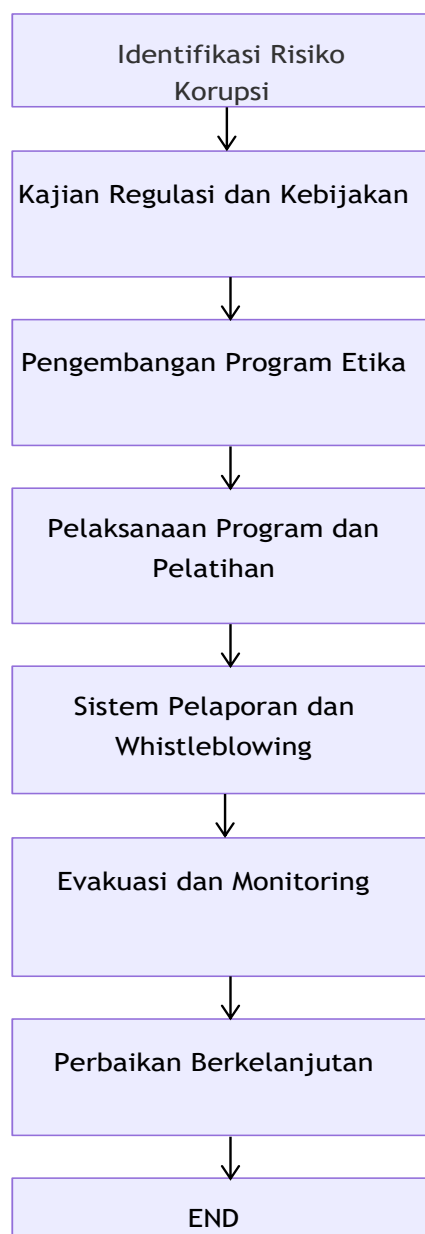
3. Teknik Visualisasi

Untuk memudahkan interpretasi data, penelitian ini menggunakan beberapa visualisasi, antara lain tabel perbandingan indeks pengukuran anti-korupsi dan diagram alir proses implementasi anti-korupsi di perusahaan industri.

Berikut adalah diagram alir yang menggambarkan proses implementasi kebijakan anti- korupsi di perusahaan industri:

...

Diagram Alir Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Utama dari Studi Literatur

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber, beberapa temuan utama yang muncul adalah:

a. Perubahan Paradigma dalam Penerapan Kebijakan Anti-Korupsi:

Studi literatur sistematis menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan anti-korupsi sangat bergantung pada reformasi kelembagaan, pelatihan kapabilitas, dan partisipasi masyarakat. Fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi lokal sangat diperlukan.

b. Peran Kepemimpinan dalam Membangun Budaya Etika:

Sejumlah penelitian menekankan bahwa kepemimpinan etis merupakan komponen kunci dalam membangun budaya organisasi yang menghilangkan toleransi terhadap korupsi. Kepemimpinan yang menjadi “contoh nyata” dapat menginspirasi perilaku etis di seluruh elemen perusahaan.

c. Penerapan Program Integritas dan Evaluasi Melalui Indeks:

Implementasi program seperti Integrity Zone meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tantangan utama terletak pada keberlanjutan transformasi budaya organisasi. Hasil evaluasi melalui SPI, IPAK, dan IPK menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan di beberapa sektor, perbaikan secara menyeluruh masih diperlukan.

2. Diskusi Tantangan dan Peluang

2.1. Tantangan Implementasi di Sektor Industri

a. Hambatan Budaya dan Struktural:

Budaya lama dan struktur organisasi yang hierarkis sering menghambat terbentuknya nilai-nilai etika yang baru. Asumsi dasar dan toleransi terhadap pelanggaran ringan masih ditemukan di beberapa perusahaan, yang mengindikasikan perlunya perubahan mendasar dalam budaya organisasi.

b. Keterbatasan Sistem Pengawasan Internal:

Meskipun sistem pelaporan dan whistleblowing telah diimplementasikan, masih terdapat keraguan di kalangan karyawan terkait keamanan dan keefektifitasan mekanisme tersebut. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

2.2 Peluang Pengembangan dan Inovasi

a. Penerapan Teknologi dan Digitalisasi:

Adopsi teknologi informasi dalam pengawasan dan pelaporan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data. Implementasi sistem terpadu untuk monitoring secara real-time merupakan salah satu inovasi yang dapat mengurangi peluang korupsi di dalam organisasi.

b. Penguatan Program Pendidikan dan Pelatihan:

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan anti-korupsi dan pendidikan etika sangat penting untuk membangun budaya organisasi yang bersih. Program pelatihan harus disesuaikan dengan karakteristik industri dan dilakukan secara berkala untuk menjaga kesadaran akan integritas

c. Kolaborasi Antar Lembaga dan Stakeholder:

Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan perusahaan swasta dapat memperkuat implementasi kebijakan anti-korupsi. Kolaborasi ini harus didorong melalui forum diskusi, workshop, dan program CSR yang mengedepankan nilai-nilai integritas.

3 Studi Kasus dan Contoh Penerapannya

Beberapa studi kasus dari dokumen yang ditinjau menunjukkan bahwa:

a. Integrity Zone Program:

Di beberapa kantor Bea Cukai, penerapan Integrity Zone telah menghasilkan pencapaian signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih ada sisi yang perlu perbaikan terutama dalam aspek budaya organisasi yang mendalam.

b. Program Etika Perusahaan:

Program etika yang diperkenalkan sejak tahun 1980-an hingga revisi FSGO pada tahun 2004 menekankan pentingnya kepemimpinan, komunikasi nilai, dan sistem pelaporan pelanggaran. Penerapan program tersebut di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam tergantung pada kesiapan internal perusahaan.

c. Indeks Pengukuran Anti-Korupsi (SPI, IPAK, dan IPK):

Hasil pengukuran melalui SPI pada tahun 2021 yang mencapai skor nasional 72,4 menunjukkan bahwa banyak instansi masih memiliki kelemahan struktural. Sementara IPAK yang mencatat skor 3,85 dan IPK dengan peringkat yang kurang memuaskan menggambarkan tantangan yang lebih luas dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi

KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai indeks penerapan kebijakan anti-korupsi dan budaya etika di perusahaan industri di Indonesia. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

1. Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi:

Reformasi kelembagaan dan penerapan program anti-korupsi seperti Integrity Zone telah memberikan dampak positif, namun keberlanjutan transformasi budaya organisasi masih menjadi tantangan utama.

2. Budaya Etika dan Kepemimpinan:

Kepemimpinan etis memainkan peran krusial dalam mempromosikan nilai-nilai integritas. Kepemimpinan yang mampu menjadi teladan dapat mengubah asumsi dasar dan perilaku karyawan.

3. Evaluasi dengan Indeks Pengukuran:

Penggunaan SPI, IPAK, dan IPK sebagai alat ukur secara objektif menggambarkan realitas bahwa meskipun terdapat perbaikan di beberapa area, masih ada celah signifikan yang harus diperbaiki untuk mencapai perusahaan yang bersih dari korupsi.

4. Rekomendasi Strategis:

Diperlukan adopsi teknologi informasi untuk memperkuat sistem pengawasan, peningkatan pelatihan yang berkelanjutan, dan kolaborasi antar lembaga guna mengatasi tantangan struktural dan budaya. Rangkuman

temuan utama dalam bentuk poin:

- a. Reformasi institusional harus didorong melalui kepemimpinan yang konsisten.
- b. Teknologi digital dapat meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan korupsi.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif penting untuk mengubah budaya organisasi.
- d. Kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Tabel 2. Visualisasi Hasil Pengukuran Indeks

Indikator	Nilai Rata-Rata	Keterangan
Survei Penilaian Integritas (SPI)	72,4	Masih menunjukkan kerentanan pada pengelolaan internal .
Indeks Perilaku Anti-korupsi (IPAK)	3,85	Menunjukkan tingkat toleransi terhadap praktik korupsi yang masih tinggi .
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	34	Menempatkan Indonesia pada peringkat yang masih

REFERENSI

- A. R. Apriliana, P. S. Manajemen, F. Ekonomi, D. Bisnis, and U. B. Lampung, "Peran Edukasi dan Pelatihan dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Perbankan," no. 4, 2024.
- C. H. Wasistha, "PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI MASYARAKAT," *Ius Const.*, vol. 1, no. Vol 6 No 2 : VERITAS, pp. 235– 255, 2020.
- C. H. Wasistha, "PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI MASYARAKAT," *J. Ius Const.*, vol. 1, no. 2, p. 53, 2025, [Online].
- D. Kurnia et al., "PENYULUHAN UNDANG UNDANG ANTI KORUPSI DI " Awareness Campaign on Anti-Corruption Laws in the Community as an Effort to Foster a Honest and Competent Generation "," pp. 142–161.
- F. A. Siregar, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan," *J. Hukum, Polit. Dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 236–252, 2023, doi: 10.55606/jhps.v2i1.1457.
- F. Nahariah, "PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN," no. Table 10, pp. 4–6, 2024.
- H. Ashari and T. P. Nugrahanti, "Fraud, Etika Dan Kegagalan Bank Dari Sudut Pandang Pegawai," *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 9, no. 2, pp. 305–324, 2021, doi: 10.17509/jrak.v9i2.30651. [21]
- Keraf, S, & Imam, R.H. (1998). *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- K. Parikka, "Apa itu Budaya Etis dan Mengapa Itu Penting dalam Pengungkapan Pelanggaran?," Falcony. 2022.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2010). *Organizational Behavior Ninth Edition*. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- S. Riza and Barrulwalidin, "Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Integritas Generasi Muda dan Mencegah Korupsi," *J. Islam. Educ.*, vol. 02, no. 01, pp. 75–87, 2024.
- Saputra, A., Priadi,E., & Rustamaji (2024). Analysis Of Slope Stability Due to Illegal Gold Mining In Bengkayang Regency *Jurnal Teknik Sipil*, 24 (1) 766-777
- Schein, E.H. (Juni ,1996). *Culture: The missing concept in organization studies*. *Administrative Science Quarterly*, hal 236. Schein, E.H. (1992). *Organizational Culture and Leadership*. San Fransisco: JousseyBass.
- Situmorang, D.,M et.al"Analysis Of Accounting Knowledge Behavior and Accounting Recording on Revenue with Cultural Behavior Moderating Variable" *Al-Mal: Journal Of Islamic Accounting and Finance [ONLINE] Volume 05 Number 02 (Des 31, 2024)*
- Su, Hwann-Yann. (2014). Business ethics and the development of intellectual capital. *Journal of Business Ethics*,119: 87-98.
- Thompson, J. W. (1995). *The renaissance of learning in business*. Dalam F. Kofman, & P. Senge, *Learning organizations developing cultures or tomorrow's workplace*. Portland, Oregon:

Productivity Press. ...
U. Kristen and S. Wacana, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)